

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Jesica Handoko (2014)

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh struktur modal dan mekanisme *corporate governance* terhadap *agency cost* perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara struktur hutang untuk *long-debt to asset*, dewan komisaris dan variabel komite audit terhadap *agency cost* adalah ditolak. Namun hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel struktur hutang untuk *long-debt to asset*, dewan komisaris, dan variabel komite audit dengan tingkat signifikansinya sebesar 10% terhadap *agency cost* yang diproyeksikan dengan *asset turnover* (AC)

Variabel struktur hutang untuk *debt to asset* dan komite audit terhadap *agency cost* yang diproyeksikan dengan *administrative expense rate* (AC2) menunjukkan hasil yang signifikan. Namun hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap struktur hutang untuk *debt to*

asset dan komite audit adalah ditolak. Selanjutnya, tidak ditemukan pengaruh signifikan dari variabel kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional terhadap *agency cost* baik yang diproyeksikan dengan AC maupun AC2. Ditemukan efek variabel pemoderasi kepemilikan pemerintah pada pengaruh beberapa mekanisme *corporate governance* terhadap *agency cost*.

Persamaan:

- a. Mengukur biaya keagenan dengan rasio perputaran aset dan biaya operasional.
- b. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Perbedaan:

- a. Penelitian Jesica Handoko memilih pengaruh struktur modal sebagai variabel independennya, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan mekanisme *good corporate governance*.
- b. Penelitian Jesica Handoko memilih perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

2. Putu Mudyasani Sudarma D. dan I Wayan Putra (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* pada biaya keagenan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. Semakin intensif perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance* maka biaya keagenan akan semakin rendah.

Prinsip *good corporate governance* meliputi tanggung jawab, independensi, akuntabilitas, dan keadilan berhasil menciptakan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham.

Persamaan:

- a. Biaya agensi diproyeksikan dengan biaya operasional dan administrasi.

Perbedaan:

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian Putu dan Wayan adalah perusahaan yang diukur dengan menggunakan skor CGPI pada tahun 2010-2012. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.
- b. Untuk menghitung biaya agensi dalam penelitian Putu dan Wayan menggunakan biaya audit yang timbul akibat *monitoring* kinerja manajer sedangkan penelitian ini menggunakan rasio perputaran aset.

3. Paulus Basuki Hadiprajitno (2013)

Penelitian yang dilakukan Paulus Basuki Hadiprajitno ini meneliti tentang struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan

biaya keagenan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia setelah 10 tahun era penerapan *good corporate governance*.

Hasil yang diperoleh adalah kepemilikan mayoritas keluarga berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diprosikan dengan rasio biaya operasional (Model B) dan berpengaruh positif terhadap rasio perputaran aset (Model A), sehingga kepemilikan mayoritas keluarga mampu menekan biaya keagenan. Kepemilikan mayoritas institusi hanya signifikan terhadap model A, model B tidak signifikan namun tanda koefisiennya konsisten sesuai positif.

Hasil selanjutnya menunjukkan jika kepemilikan mayoritas pemerintah terhadap model A dan model B signifikan pada 1%. Kepemilikan mayoritas asing signifikan terhadap model B. Hasil tidak konsisten terjadi pada konsentrasi kepemilikan yaitu tanda arah pengaruh model A bertentangan, sedangkan model B positif sesuai hipotesis. Jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah komisaris independen menunjukkan biaya keagenan meningkat. Rapat komite dan komite nominasi/ remunerasi untuk model A maupun model B tidak signifikan.

Persamaan:

- a. Dalam menghitung biaya keagenan memproyeksikan rasio perputaran aset dan rasio biaya operasional.

- b. Menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder yaitu dari laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan.

Perbedaan:

- a. Dalam penelitian Paulus Basuki Hadiprajitno menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor perdagangan periode 2012-2014.
 - b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Paulus Basuki Hadiprajitno adalah kepemilikan mayoritas keluarga, kepemilikan mayoritas institusi keuangan, kepemilikan mayoritas pemerintah, kepemilikan mayoritas asing, konsentrasi pemilik, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, dan adanya komite nominasi/ remunerasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
4. Aga Nugroho Saputro dan Muchamad Syafruddin (2012)
- Penelitian yang dilakukan ini meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap biaya keagenan perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusi, kepemilikan asing dan kepemilikan

terkonsentrasi sebagai variabel independen dengan biaya keagenan yang dihitung dengan rasio perputaran aset (ATO) dan *operating general and administrative* (OGA).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusi dan kepemilikan terkonsentrasi yang dihitung dengan ATO memiliki hasil yang tidak signifikan terhadap biaya keagenan. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap biaya keagenan yang juga dihitung dengan ATO. Sedangkan hasil penelitian yang dihitung dengan OGA yaitu dewan komisaris menunjukkan hasil yang signifikan terhadap biaya keagenan. Kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusi, kepemilikan asing dan kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan.

Persamaan:

- a. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan adalah dewan komisaris dan kepemilikan institusional.
- b. Menggunakan rasio perputaran aset dan biaya operasional dan administrasi untuk mengukur biaya keagenan.

Perbedaan:

- a. Sampel perusahaan dalam penelitian Aga Nugroho Saputro dan Muchamad Syafruddin adalah perusahaan sektor perdagangan 2008-

2010, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perdagangan periode 2012-2014.

- b. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian Aga Nugroho Saputro dan Muchamad Syafruddin adalah kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan terkonsentrasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial.

5. Linda (2012)

Penelitian ini menganalisis hubungan mekanisme *internal corporate governance* dalam meminimumkan biaya agensi. Persentase *non*-eksekutif direktur, eksekutif direktur, komite audit, dan struktur hutang jangka pendek hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam meminimumkan biaya agensi.

Struktur hutang jangka pendek juga tidak dapat meminimumkan tingginya biaya agensi, kemungkinan karena sampel pada penelitian ini adalah perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi sehingga tidak bermasalah dengan arus kas perusahaan.

Persamaan:

- a. Biaya keagenan diukur dengan rasio biaya operasional dan rasio perputaran aset.

Perbedaan:

- a. Penelitian Linda menggunakan teknik analisis data dengan *Partial Least Square*, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.
 - b. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian Linda adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perdagangan.
6. Zaenal Arifin (2005)

Peneliti memilih topik mengenai hubungan antara *corporate governance* dan variabel pengurang masalah agensi. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen akan memiliki nilai *corporate governance* yang lebih tinggi tidak terbukti secara empiris. Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara nilai *corporate governance* dengan kepemilikan saham yang besar juga tidak terbukti secara statistik empiris.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara nilai *corporate governance* dan porsi hutang perusahaan mengalami hal yang sama dengan hipotesis satu dan dua. Hipotesis yang terakhir menyatakan bahwa ada hubungan positif antara nilai *corporate governance* dan *dividen payout ratio* namun hipotesis tersebut tidak terbukti secara empiris.

Persamaan:

- a. Topik membahas mengenai *good corporate governance* dan biaya keagenan.
- b. Pengukuran terhadap variabel independen menggunakan dewan komisaris.

Perbedaan:

- a. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian Zaenal Arifin adalah perusahaan yang dinilai indeks *corporate governance*-nya oleh majalah SWA dan IICG pada tahun 2001, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perdagangan.
- b. *Good corporate governance* yang digunakan penelitian Zaenal Arifin menggunakan kepemilikan saham, porsi hutang perusahaan dan *dividen payout ratio*. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori agensi (*Agency Theory*)

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang disebut *agen* yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-harinya. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh

keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Adrian, 2012:13).

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara pemilik dan manajer. Perencanaan kontrak yang tepat antara pemilik dan manajer untuk menyamakan kepentingan inilah yang menjadi masalah inti dari teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam suatu organisasi, teori keagenan menyatakan bahwa pemilik merupakan principal dan manajer merupakan agen dan terdapat kerugian agensi yang diakibatkan adanya kerugian akibat penyerahan kendali dari principal kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

2.2.2 Definisi Biaya Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*the principal*) dan para agen. Biaya agensi timbul dari adanya konflik kepentingan antara pengelola perusahaan dengan pemegang saham (*principal*). Konflik kepentingan atau masalah keagenan ini muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal, misalnya saja perilaku agen yang seringkali nampak pada saat agen memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun kebijakan tersebut bukan yang terbaik bagi *principal* (Sugiarto, 2009:54).

Pearce dan Robinson (2008: 38) menyatakan ketika terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajer (agen) disuatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan.

Terdapat dua rasio efisiensi untuk memproksikan biaya agensi (Ang, Cole dan Lin, 2000 dalam Linda, 2012):

- a. Rasio beban operasional, yaitu beban operasi yang dibagi dengan total penjualan tahunan. Jika rasio beban ini mengukur ketidakefisienan pengontrolan biaya operasi oleh pihak manajerial, rasio yang tinggi (merupakan indikator operasi yang tidak efisien) yang dihubungkan dengan biaya agensi yang tinggi.

$$\text{Rasio Biaya Operasional} = \text{Biaya penjualan adm, dan umum} : \text{Penjualan tahunan}$$

- b. Rasio perputaran aset, yaitu total penjualan tahunan dibagi dengan total aset. Rasio ini mengukur sejauhmana keefektifan manajemen perusahaan menggunakan aset. Ketika total penjualan perusahaan rendah terhadap total aset, ini berarti manajer tidak efisien dengan keputusan investasinya.

$$\text{Rasio Perputaran Aset} = \text{Penjualan} : \text{Total Aset}$$

Bentuk dari biaya keagenan (Meckling, 1976) adalah:

a. *Biaya monitoring by the principle*

Biaya ini dikeluarkan oleh pemilik untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku manajer

b. *Biaya bonding by the agent*

Biaya ini dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa manajer mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham

c. *The residual loss*

Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan dan penjaminan telah dilaksanakan.

Masalah keagenan muncul dalam berbagai tipe (Sugiarto, 2009:55) adalah sebagai berikut:

a. *Konflik antara manajer dan pemegang saham*

Tim manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Terkadang hal tersebut tidak sejalan akibat banyaknya keputusan yang diambil manajer menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham.

b. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas

Pemegang saham mayoritas yang biasanya menjadi manajer di perusahaan dapat mengambil keputusan yang hanya menguntungkan pemegang saham minoritas.

c. Konflik antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman selalu berharap agar bisnis perusahaan berjalan aman sehingga uang yang dipinjamkan dapat kembali, namun pemegang saham dapat saja memilih bisnis yang beresiko tinggi dengan harapan mendapatkan *return* yang lebih tinggi pula.

2.2.3 Definisi Good Corporate Governance

M. Umer dan Habib (2008:17) *The Organization of Economic Corporation and Development (OECD)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*). Perspektif mengenai tata kelola perusahaan terkadang disebut sebagai pemisahan kepemilikan dan pengawasan.

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan tersebut (Zaenal, 2005). Tri Gunarsih (2003) dalam Ndaruningpuri (2006) *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer,

dan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan.

Adrian (2012:13) menyatakan bahwa *corporate governance* terdiri dari unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi, dan komite audit. Dalam rangka penerapan *corporate governance* adalah dengan melakukan pembenahan terhadap struktur kepemilikan yang mana terjadi pemusatan kepemilikan pada suatu pihak tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan (Adrian, 2012:107).

2.2.4 Prinsip Good Corporate Governance

Muh. Arief (2009:4) Prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG sebagai berikut:

a. **Transparansi**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan

b. **Pengungkapan**

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional.

c. Kemandirian

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

e. Pertanggungjawaban

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

f. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Manfaat *good corporate governance* bagi perusahaan (IICG, 2000) sebagai berikut:

- a. Mengurangi *agency cost* yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang timbul akibat

penyalahgunaan wewenang ataupun biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- b. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan menurunnya tingkat risiko perusahaan.

2.2.6 Mekanisme *good corporate governance*

Walsh dan Seward (1990) dalam Zaenal (2005) berpendapat bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam rangka penerapan *corporate governance*, dua mekanisme tersebut adalah mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar. Tjager et al (2003) dalam Okky dan Supatmi (2010) berpendapat bahwa pelaksanaan *corporate governance* dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Tujuh komponen CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) menurut IICG (*The Indonesian For Corporate Governance*) adalah komitmen terhadap *corporate governance*, hak pemegang saham, tata kelola dewan komisaris, komite fungsional yang membantu tata kelola dewan komisaris, direksi, transparansi, hubungan dengan *stakeholder*.

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006:13). Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi (KNKG, 2006:16).

Dewan komisaris sebagai perwakilan mereka untuk mengawasi aktivitas manajemen. Dengan asumsi dewan komisaris mewakili pemegang saham, baik pengendalian maupun minoritas, maka dewan komisaris merupakan alat pengendalian dan merupakan elemen yang sangat penting dalam mekanisme internal *corporate governance* (Jesica, 2014).

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas tugas dewan komisaris adalah:

- a. Mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan
- b. Memberi nasehat kepada direksi

Dewan Komisaris = Jumlah rapat dewan komisaris
--

2. Kepemilikan Manajerial

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi agency cost, diantaranya dengan meningkatkan kepemilikan dari dalam atau kepemilikan

manajerial. Penambahan kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk meratakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri (Jesica, 2014).

KM= jumlah kepemilikan saham direksi : total saham yang beredar.

3. Kepemilikan Institusional

Nurainun dan Krisnawati (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusi memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Boediono (2005) dalam Elva (2012) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Imanda dan Mohammad (2006) berpendapat bahwa pengawasan oleh investor institusional dapat mengurangi biaya keagenan. Untuk menghitung kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

KI= Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Institusi : Total Saham Yang Beredar
--

2.2.7 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan

Aga dan Muchamad (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas untuk menjamin bahwa strategi yang dibentuk untuk perusahaan dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan yang direncanakan serta melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan.

Kaen (2003), Shaw (2003), Knell (2006), dan Nadler dkk (2006) dalam Paulus (2013) dalam bukunya mengenai tata kelola perusahaan, semuanya mengungkapkan bahwa dalam menilai kualitas dan kinerja *board* termasuk komite audit perlu memperhatikan lebih pada “proses kerja” dibanding hanya pada jumlah anggotanya.

Dewan komisaris mewakili pemegang saham, baik pengendali maupun minoritas, maka dewan komisaris merupakan alat pengendalian dan merupakan elemen yang sangat penting dalam mekanisme internal CG (Jesica, 2014). Jumlah rapat dewan komisaris terbukti secara empiris meningkatkan perputaran aset perusahaan (manajemen aset). Fungsi dewan sebagai pengawas manajemen dapat dicerminkan dari rapat-rapat yang dilakukan dewan dan berkaitan dengan pengendalian manajemen yang lebih berkualitas (Paulus, 2013).

2.2.8 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Keagenan

Jesica (2012) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan manajerial dapat memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti makin tingginya proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan berupaya dengan giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan ini akan mengindikasikan tingginya rasio perputaran aset (Krisnauli dan Paulus, 2014).

2.2.9 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Keagenan

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah yang besar akan semakin insentif dalam mengambil keputusan dalam perusahaan, namun

walaupun perusahaan yang memiliki institusional yang tinggi, bisa saja memiliki tingkat perputaran yang rendah dengan alasan dana yang digunakan terlalu tinggi, sehingga perputaran rendah (Aga, 2012).

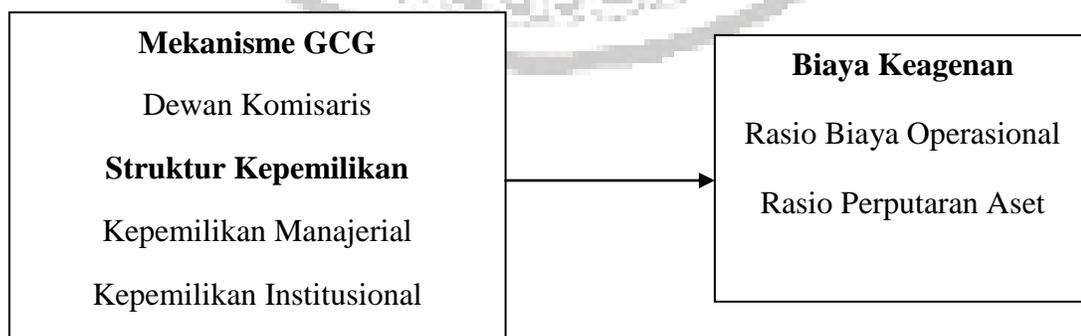
Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Krisnauli dan Paulus (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepeilkan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi agency cost

2.3 Kerangka Pemikiran

Agar dapat lebih mudah untuk memahami *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap biaya keagenan pada perusahaan sektor perdagangandengan menggunakan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



Keterangan:

Gambar diatas menggambarkan apakah dewan komisaris, kepemilikan manjaerial, dan kepemilikan institusional dapat menekan biaya terhadap biaya keagenan dengan memproyeksikan rasio biaya operasi (RBO) dan rasio perputaran aset (RPA).

2.4 Hipotesis Penelitian

Atas kerangka pemikiran diatas hipotesis yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio biaya operasional (RBO)

H2: Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan diproyeksikan dengan rasio biaya operasional (RBO)

H3: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan diproyeksikan dengan rasio biaya operasional (RBO)

H4: Terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap biaya keagenan yang diproyeksikan dengan rasio perputaran aset (RPA)

H5: Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan diproyeksikan dengan rasio perputaran aset (RPA)

H6: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan diproyeksikan dengan rasio perputaran aset (RPA)